

# 05. ETIKA, ORGANISASI, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

*By* Indrawati Yuhertiana



ditentukan oleh kepercayaan masyarakat yang diciptakan oleh pelayanan prima yang diberikan karena telah menerapkan prinsip etika profesi yaitu tanggung jawab dan integritas (11) (Mubandariyah 2015). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat dengan persepsi masyarakat tentang pajak yang akan memengaruhi motivasi wajib pajak dalam menaati pajak. Motivasi inilah yang selanjutnya memengaruhi kepatuhan (11) wajib pajak dalam menaati kewajiban perpajakan. Bangsa yang masyarakat yang masih teranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bernilai paksaan dan tidak memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah pajak, sehingga wajib pajak cenderung untuk menghindarinya (Culita et al. 2007, Rahayu 2015, Ariekiana et al. 2012).

Diritjas di (22) bahwa psikologi, terdapat tiga hal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, 1) sejauh mana wajib pajak merasa rang yang dibayarkannya diimbangi oleh pelayanan publik yang diterimanya, 2) sejauh mana kondisi ekonomi dan politik berlaku saat, dan 3) perasaan nyaman atas petugas pajak (Mendiknas) pada saat pemeriksaan bisa memengaruhi atau meningkatkan keinginan untuk menaati pajak (Feld dan Frey 2007). Dalam penelitian lain, layanan petugas pajak diartikan sebagai faktor yang terpenting (Ryan et al. 2008, Rahayu 2015). Merindaklanjuti hal ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, seperti perubahan organisasi serta budaya organisasi yang lebih kondusif. Lebih lanjut, melalui peran Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai pajak sehingga dapat menyampaikan pelayanannya kepada publik (Pretomodirjo 2007).

Memperburuknya tentang etika dalam perpajakan, telah banyak terjadi kasus penggelapan pajak seperti yang dilakukan oleh Dayu dan beberapa oknum pegawai pajak lainnya (Bani 2014, Fidiana 2014, Haniy dan Rasyidi 2012). Kasus penggelapan pajak pernah pula dilakukan oleh wajib pajak yang dikenal dengan kasus Asien Agri yang melibatkan akuntan perusahaan beserta jajaran direksinya (Aprianto et al. 2007). Meningkatnya kasus pelanggaran dan manipulasi pajak ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana etika diterapkan dalam organisasi, serta bagaimana etika dipahami. Di sisi lain, regulasi mengharuskan institusi untuk mengim-

plementasikan konsep good governance yang mengedepankan nilai transparansi, tanggungjawab, kredibilitas, independensi, dan akuntabilitas. Gap inilah yang mendorong penelitian dilakukan.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman etika wajib pajak dalam menaati komitmen organisasi, budaya organisasi dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana sosial sering kali terjadi dalam interaksi antarindividu dalam organisasi, serta antarpemerintah pajak dan Negara. Ternyata interaksi ini berhubungan dengan kekuasaan dan kepercayaan (Gargl et al. 2015). Konsep GCG dipercaya dapat membangun budaya organisasi yang bernilai (Ardehali et al. 2009).

## METODE

Penelitian kuantitatif ini menggunakan lima variabel yang meliputi komitmen organisasi, budaya organisasi, corporate governance, etika perpajakan, dan pemahaman etika perpajakan. Komitmen organisasi di (31) akan sebagai sebuah keinginan sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasi serta berkeinginan untuk tinggal bersama-sama dan sejahteranya individu mengenai dan terikat pada organisasinya. Penelitian ini mengadopsi dan mengukur komitmen organisasi dengan dimensi affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment (M (32) et al. 1993). Variabel kedua adalah budaya organisasi yang didefinisikan sebagai sistem yang diterapkan dan nilai yang diadopsikan oleh organisasi yang menentukan perilaku dari anggota organisasi tersebut. Kamus budaya organisasi diartikan dengan dimensi profesionalisme, jarak dari manajemen, kepemimpinan, rekan sekerja, keteraturan, pemenuhan dan integritas. Variabel ketiga (33) adalah corporate governance, merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mengontrol dan mengendalikan perusahaan sehingga tercapai laba jangka panjang yang baik, nilai transparansi dimana berbagai pihak terkait dan memiliki kepentingan dalam perusahaan. Dimensi dari good corporate governance adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

Variabel keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman etika perpajakan. Variabel ini mengukur kondisi benar-salahnya persepsi pada kondisi perpajakan. Variabel terakhir yaitu

**Tabel 1: Tingkat pengembalian kuesioner (Response Rate)**

KOTA	KUESIONER DISEBAR	KUESIONER KEMBALI	RESPON RATE
Surabaya	75	64	85,3%
Sidoarjo	50	28	56%
Malang	50	19	38%
Mojokerto	50	10	20%
Medan	25	7	28%
Bangkalan	50	15	30%
Response Rate	300	143	47,6%
Usable Response Rate		138	46%

kepatuhan wajib pajak yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Populasi penelitian adalah wajib pajak badan non pemerintah (swasta) yang berada di enam kota besar di Jawa Timur, yang diwakili oleh Surabaya, Mojokerto, Malang, Bangkalan, Sidoarjo dan Medan sejumlah 225.345. Adapun jumlah sampel sejumlah 138 wajib pajak dipilih dengan menggunakan

instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data berupa kuesioner yang terdiri dari 50 item pertanyaan. Konten organisasi sejumlah 7 pertanyaan, budaya organisasi 10 pertanyaan, Good Corporate Governance (GCG) 11 pertanyaan, etika 7 pertanyaan, dan kepatuhan wajib pajak 14 pertanyaan. Kuesioner disusun dengan teknik multi dimensi skala, 5 skala.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner tertutup yang diajukan kepada responden. Sebelum kuesioner digunakan dalam penelitian, dilakukan pengujian terhadap mahasiswa Pascasarjana UPM Veteran Jawa Timur. Uji coba kuesioner ini representatif karena dipilih mahasiswa yang memiliki usaha sendiri sehingga memiliki ciri-ciri yang sama dengan responden sebenarnya, yaitu pemilik KPWP badan. Dari hasil analisis diketahui item pertanyaan yang disajikan reliabel dan valid, sehingga kuesioner dapat disebarkan kepada responden berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Disamping itu juga dilakukan wawancara secara langsung kepada beberapa responden terpilih untuk mengetahui implementasi pemenuhan kewajiban mereka.

Model Structural Equation Modeling (SEM) digunakan dalam penelitian ini karena faktor kompleksitas permasalahan yang dapat dilihat pada konsep-konsep. Hair et al. (1992), menyatakan bahwa SEM adalah suatu teknik analisis multivariante yang mengkonstruksikan aspek regresi berganda (dalam memeriksa hubungan ketergantungan) dan analisis faktor (representasi konsep yang tak terukur, faktor dengan multi variabel) untuk mengestimasi serangkaian hubungan saling ketergantungan sejumlah variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada para wajib pajak di enam kota wilayah Jawa Timur. Tabel 1. berikut menyajikan data yang telah berasal dari 138 responden, dengan tingkat usable response rate sebesar 46%. Tabel ini menjelaskan respon rate masing-masing kota.

Response rate dapat disimpulkan cukup baik yaitu mencapai 47,6%. Dibandingkan dengan penelitian lain, jumlah ini tergolong cukup besar. Response rate yang terbesar diperoleh di kota Surabaya. Sementara Malang merupakan kota yang memiliki respon rate rendah. Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau potong pajak lainnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Tabel 2. Usia Responden**

Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
20 – 30	43	31,2
31 – 40	32	23,2
41 – 50	28	20,3
51 – 60	14	10,1
61 ke atas	3	2,2
Tidak diketahui	18	13,0
Total	138	100

Dari responden yang berjumlah 138 orang, sejumlah 64% adalah laki-laki yang berusia rentang 20-30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak muda yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah perpajakan dari keluarga di perusahaan. Regulasi perpajakan yang sangat dinamis dianggap sangat cocok dikerjakan secara teknis oleh para *fresh graduate* yang telah memiliki pengalaman di kantor akuntan atau konsultan pajak. Harapannya, mereka telah memiliki kemampuan untuk menghitung, melaporkan dan mengelola pajak perusahaan.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sejumlah 54% responden dengan rentang waktu operasi perusahaan 0-5 tahun ternyata masih baru memiliki NPWP. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Sektor perdagangan merupakan jenis usaha yang mayoritas diketahui responden. Memahami jenis bidang usaha dan skala perusahaan memudahkan untuk menganalisis prediksi penerimaan perpajakan, sekaligus prediksi jumlah pajak yang diterima. Dengan demikian, komposisi objek dalam penelitian ini meliputi jenis perusahaan dagang dan jasa.

**Uji Asumsi.** Salah satu asumsi SEM adalah bahwa data memiliki distribusi normal. "Rule of thumb" untuk menguji normalitas data adalah dengan menggunakan nilai skewness-nya (Hair et al. 2006). Data terdistribusi normal pada rentang  $z \pm 2,58$  pada  $\alpha = 0,01$  atau pada rentang  $z \pm 1,96$  pada  $\alpha = 0,05$ . Hasil uji normalitas data dengan menerima nilai 2 pada  $\alpha = 0,01$  menunjukkan bahwa angka yang berada di luar rentang  $z \pm 1,96$  pada  $\alpha = 0,05$ , terpasang dibuang sehingga total  $n$  yang sisa adalah menjadi 109. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya, pengujian terhadap gejala multikolinieritas antar variabel bebas memperlihatkan tidak adanya gejala multikolinieritas yang merusak model terlihat dari determinasi of sample covariance matrix dan angka ini jauh dari nol. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau singuleritas dalam data ini sehingga asumsi terpenuhi. Sementara itu, hasil pengukuran factor loading setiap butir dari konstruk dengan *confirmatory factor analysis* dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa dengan menggunakan Cronbach-Alpha, seluruh variabel adalah reliabel memiliki cut off yang disarankan, yaitu di atas 0,5 (Sollman 2002).

**Tabel 3. Lama perusahaan memiliki NPWP**

Usia	Jumlah	Persentase (%)
0 – 5 tahun	60	50
6 – 10 tahun	30	30,3
11 – 20 tahun	15	11,6
Lebih dari 20	4	2,9
Tidak diketahui	21	15,2
Total	130	100

**Tabel 4. Pengelompokan berdasarkan Bidang Usaha Wajib Pajak**

Jenis Perusahaan	Jumlah	Persentase (%)
Jasa	43	31,2
Dagang	13	38,4
Industri	12	8,7
Tidak dibedakan	10	21,7
Total	100	100

Hasil pengujian menunjukkan model pengukuran (measurement model) cukup baik untuk digunakan dalam analisis, karena mayoritas telah berada di atas cut off yang digunakan. Hal ini berarti indikator yang digunakan untuk mengukur sebuah variabel laten secara bersama-sama cukup kuat memprediksikan unidimensionalitas variabel tersebut. Untuk menguji model pengukuran ini digunakan *Confirmatory Factor Analysis* (Pordnawati 2002). Tabel 6 menjelaskan hasil uji kesesuaian model terhadap ke-lima variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam uji kesesuaian model pengukuran disimpulkan bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian memiliki model yang dapat diterima. Dengan demikian, kelima variabel laten tersebut dapat diuji hubungan kausalitasnya dalam model persamaan struktural. Untuk itu setelah dahulu model persamaan struktural ini diuji kesesuaian modelnya. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 7.

Hasil pada perhitungan *goodness of fit* yaitu *chi square* pertama, menghasilkan model yang belum memuaskan karena harga dua kriteria yang harus terpuisi yaitu *CMIN/DF* sebesar 1,986 dan *RMSEA* sebesar 0,353, masing-masing berada di bawah *cut of* nolnya. Oleh karena itu untuk menghasilkan model yang baik, dengan harapan terpenuhinya kriteria uji kesesuaian model lainnya, maka model dimodifikasi menurut

indeks modifikasi yang disarankan oleh *software Amos 4.01*. Hasil perhitungan setelah model dimodifikasi menunjukkan bahwa enam indeks mengalami perbaikan, mampu memenuhi *goodness of fit* nolnya pada *Chi Square* yang menurun, semakin kecil, *p-value*, *GFI*, *AGFI*, *TLI*, dan *CFI*. Dengan demikian seluruh indeks dalam uji kesesuaian model telah terpenuhi sehingga model ini dapat diterima atau sesuai dengan data dan dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut.

Penelitian ini menjelaskan konteks psikologis dari sisi wajib pajak terkait kepatuhannya membayar pajak yang dilakukan dari perspektif wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pemahaman etika wajib pajak dalam memedomani komitmen organisasi, budaya organisasi, dan *Good Corporate Governance* terhadap kepatuhan wajib pajak. Konteks psikologis perpajakan meliputi *theory of economic crime* yang tidak mampu menjelaskan perilaku ketidakpatuhan pajak walaupun sudah disimpulkan desde atau sanksi yang tinggi (Feld dan Frey 2007). Konteks psikologi tentang pajak menjelaskan aspek behavior klanannya psikologi tentang kepatuhan wajib pajak. Etika dari moral disebut sebagai kondisi psikologis yang menyatakan bahwa kalau wajib pajak menyadari norma kebaikan maka tidak perlu menunggu diterapkannya desde atau sanksi pajak yang tinggi maka etomoral akan penuh membayar pajak.

**Tabel 5. Reliabilitas Variabel**

Construct	Cronbach Alpha ( <i>Cut off</i> = 0,80)
Komitmen Organisasi	,8471
Budaya Organisasi	,7905
Good Corporate Governance	,8040
Pemahaman Etika Perpajakan	,7805
Kepatuhan Wajib Pajak	,7069

Tabel 6. Uji Homoskedastisitas model – Model Pengukuran

Goodness of Fit Index	Cut Off	VARIABEL LATIH					Kesimpulan
		BO	BO	GOG	PEP	KWP	
Chi Square	Salah satu anggota	21.535	27.499	5.787	10.29	13.818	memenuhi syarat
CMRNP	< 2	44494	1.129	5.025	10.29	1.125	memenuhi syarat
P value	> 0,05	0	0.106	0.065	0.081	0.026	memenuhi syarat, kecuali PEP
GFI	> 0,50	0.958	0.977	0.955	0.98	0.98	memenuhi syarat
AGFI	> 0,50	0.75	0.958	0.975	0.877	0.969	memenuhi syarat, kecuali BO dan PEP
TLI	> 0,95	0.72	0.957	1.008	0.764	0.983	memenuhi syarat, kecuali BO dan PEP
CFI	> 0,95	0.423	0.973	1	0.921	0.987	memenuhi syarat, kecuali BO

Pada skema lebih menekankan relevansi variabel eksternal seperti tarif pajak, pendapatan dan audit dan tingginya denda, namun demikian penelitian psikologi menunjukkan bahwa variabel internal juga sama pentingnya (Hofmann et al. 2008). Variabel internal tersebut meliputi pengetahuan warga negara tentang hukum pajak, sikap mereka terhadap pemerintah dan perpajakan, norma-norma pribadi, norma-norma sosial dan kondisi, serta kecenderungan motivasi untuk mematuhi, dan mendiskusikan kemungkinan intervensi strategis untuk meningkatkan pajak. Berdasarkan tabel di atas, koefisien jalur pengaruh etika (PEP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP) sebesar 0,790, lebih besar dari cut-off 0,05. Dari data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman etika perpajakan tidak terbukti memoderasi variabel komitmen organisasi, budaya organisasi dan Good Corporate Governance terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini agak mengejutkan karena berbeda dengan penelitian sejenis lainnya yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara [BO](#) dan kepatuhan wajib pajak di antara [tax professional](#) yang memiliki [kepercayaan moral yang tinggi, nilai ketidakpuasan pajaknya rendah atau sebaliknya](#) (Rusli-kasari 2007). Penelitian tentang etika dalam kepatuhan wajib pajak telah lama dilakukan dan banyak mengalami perkembangan (Ali dan Tongler 2012). Penelitian selama ini yang banyak berlandaskan ada teori ekonomi neo klasik yang menganggap bahwa individu lebih mementingkan diri sendiri (Ali dan Tongler 2012). Terdapat motivasi dalam pengambilan keputusan etikal perpajakan moralis, utilitas lain bahwa beramalan petugas pajaknya dan kemudahan administrasi perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

Tabel 7. Hasil Uji Persamaan Struktural

Goodness of Fit Index	Cut-off	Hasil Perhitungan Model Awal	Hasil Perhitungan Setelah Model Dimodifikasi
Chi Square	Salah satu anggota	1088,804	453,102
CMRNP	< 2	1.986	1.021
P value	> 0,05	0,000	0,269
GFI	> 0,50	0,848	0,927
AGFI	> 0,50	0,822	0,882
TLI	> 0,95	0,829	0,996
CFI	> 0,95	0,840	0,997
RMSEA	< 0,08	0,25	0,088

Tabel 6. **Korelasi Jalur**

			<b>Estimate</b>	<b>S.E.</b>	<b>C.R.</b>	<b>P</b>	<b>Kesimpulan</b>
PEP	←	EO	,590	,254	2,325	,020	signifikan
PEP	←	BO	-,085	,102	-,830	,407	Non signifikan
PEP	←	GCG	,420	,202	2,081	,037	Signifikan
KWP	←	PEP	-,380	1,427	-,267	,790	Non signifikan

Keterangan:

PEP : Pemahaman Etna Perpajakan

EO : Efektifitas Organisasi

BO : Budaya Organisasi

GCG : Good Corporate Governance

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

memiliki. Riset yang secara spesifik menguji etika untuk mempengaruhi kepatuhan pajak dilakukan dengan menginvestigasi etika dari orientasi etika dan evaluasi etika memprediksi bahwa orientasi etika mempengaruhi etika evaluasi dan selanjutnya secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak (Henderson dan Kaplan 2008).

Skala perusahaan (responden yang mayoritas berasal dari wajib pajak badan skala kecil dan menengah) tidak mampu menjelaskan dugaan yang diajukan. Objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya menjelaskan perbedaan temuan dengan penelitian sebelumnya. Objek dalam penelitian ini adalah mayoritas adalah wajib pajak perusahaan kecil dengan jenis usaha dagang serta jasa dan bentuk usaha perseorangan. Perusahaan kecil sering tertinggal dalam melakukan perubahan organisasi karena masih dibebani oleh beban pajak internal. The General Accounting Office dalam Bishara (2003) menemukan bahwa perusahaan multinasional memiliki tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan jasa (service) dan dagang secara ritel. Rice dalam Bishara (2003) telah melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan perusahaan perusahaan kecil terhadap peraturan perpajakan. Rice menemukan bahwa 2/3 dari perusahaan kecil yang diteliti tidak mematuhi peraturan perpajakan. Faktor faktor yang signifikan yang ditemukan dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan kecil terhadap peraturan perpajakan adalah pengungkapan laporan keuangan kepada publik (memiliki hubungan positif), Marginal Tax Rate (memiliki hubungan negatif), dan

ran perusahaan (memiliki hubungan positif) dan lokasi yang didominasi oleh IRS yang masuk dalam Poor Compliance Regional.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa komitmen organisasi dan implementasi good corporate governance yang baik. Kedua variabel ini menjadi variabel kunci mempengaruhi etika perpajakan. Data yang diperoleh dari responden menunjukkan pemahaman terhadap etika dapat dirangsang rata-rata responden memiliki pemahaman yang cukup bagus namun demikian pemahaman yang dimiliki bukan merupakan variabel penghubung bagi variabel independen yang ada dalam penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak karena meskipun etika sering kali dirangsang dengan moral seseorang namun demikian etika tidak langsung membuat seseorang menjadi lebih baik, melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap dengan berbagai moralitas yang saling bertentangan.

**Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pemahaman Etna Perpajakan.** Dalam hidup berorganisasi, komitmen adalah kata kunci (Powe 2003). Komitmen penting untuk menjaga hubungan terutama untuk pencapaian tujuan bersama, dari komitmen dalam organisasi. Lengkapnya komitmen tentunya akan mengganggu pencapaian tujuan yang diinginkan. Beberapa jenis arah hubungan bisa terjadi antara komitmen organisasi dan etika. Secara umum, peneliti menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap etika. Lingkungan kerja yang baik dapat menyebabkan menurunnya rasa tidak bertanggung dan memperbaiki kondisi psikologi di antara teman sekerja. Lebih jauh lagi, mayoritas sering akan memperhatikan masalah etika ketika mereka akan menar-



tuakan hal yang penting. Komitmen menjadi bagian etika utama dalam masyarakat. Inilah mengapa orang yang memiliki komitmen tinggi lebih efisien dalam bekerja dibandingkan mereka yang berkomitmen rendah.

Berdasarkan hasil analisis SEM, komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pemahaman etika perpajakan <sup>24</sup> gaji pajak di Jawa Timur dengan *Path* 0,020 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan semakin tinggi komitmen organisasi wajib pajak, maka pemahaman etika perpajakannya juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini didasari oleh jawaban responden wajib pajak di Jawa Timur tentang komitmen organisasi yang menunjukkan hasil mereka memiliki komitmen organisasi yang cukup tinggi. Ini berarti mereka berupaya dengan segala cara untuk memajukan perusahaan, bangga terhadap perusahaannya, berusaha agar tetap dapat bekerja di perusahaan tersebut, karena merasa prinsip-prinsip hidupnya sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan. Mereka merasa yakin atas pilihan bekerja pada perusahaannya saat ini adalah tepat. Oleh karena itu, mereka memiliki kepedulian yang sangat besar akan masa depan perusahaannya. Hasil ini sejalan dengan pendapat Allen dan Meyer (1990) yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen yaitu: a) Komitmen <sup>25</sup> *affective commitment*, merupakan keterlibatan emosional seseorang pada organisasinya berupa perasaan cinta pada organisasi, b) Komitmen kognitif *continuance commitment*, yaitu persepsi seseorang atas biaya dan resiko dengan meninggalkan organisasi saat ini. Artinya, terlepas dua aspek pada komitmen kognitif, yaitu melibatkan pertimbangan pribadi apabila meninggalkan organisasi dan ketidaksiaran alternatif yang tersedia bagi orang tersebut, c) Komitmen normatif *normative commitment*, merupakan sebuah dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. <sup>26</sup>

Secara umum, seorang karyawan yang memiliki komitmen aktif yang kuat akan tetap tinggal bersama organisasi dikarenakan mereka ingin tinggal (*because they want to*). Karyawan yang memiliki komitmen kon-

tinu yang kuat dikarenakan mereka harus tinggal bersama organisasi (*because they have to*). Karyawan yang memiliki kebutuhan komitmen normatif disebabkan mereka merasa harus tinggal bersama (*because they feel that they have to*). Hasil penelitian ini menunjukkan wajib pajak di Jawa Timur yang mempunyai komitmen organisasi yang cukup tinggi akan mempengaruhi pemahamannya tentang etika perpajakan. Hal ini didukung dengan hasil jawaban responden tentang pemahaman etika perpajakan. Para wajib pajak di Jawa Timur mempersepsikan bahwa mereka telah melaporkan aktivitas perusahaannya dan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan tepat waktu. Wajib pajak cenderung setuju untuk melampirkan laporan keuangannya. Ini berarti transparansi laporan keuangan bukan merupakan hal yang menyulitkan mereka, meskipun masih terdapat 9,0% responden yang kurang setuju. Dalam konteks etika, komitmen sosial atau pelanggaran peraturan atau norma menjadi sangat penting. Penegakan disiplin atau kasus-kasus etika sangatlah diperlukan agar tidak efek jera, sehingga diharapkan tidak terjadi pelanggaran lagi. Wajib pajak di Jawa Timur selaku responden merasa adanya sanksi terhadap pelanggaran pajak sangat penting, karena perpajakan merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

**Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pemahaman Etika Perpajakan.** Istilah budaya terinspirasi oleh masyarakat baik dalam keluarga, organisasi maupun bangsa. Budaya mengikat anggota kelompok menjadi satu kesatuan pandangan yang merefleksikan keragaman perilaku dan tindakan. Budaya organisasi mewakili sebuah persepsi yang sama dari para anggotanya. Budaya organisasi ini sebagai sistem nilai organisasi dan akan memengaruhi bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan perilaku karyawan. Terkait budaya organisasi dan perpajakan, dalam penelitian Cullis et al. (2012) menunjukkan bahwa keputusan wajib pajak juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya antarnegara. Budaya dalam kaitannya dengan keputusan perpajakan dipengaruhi oleh perilaku dan nilai yang dipegang oleh manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pemahaman etika wajib pajak. Hasil ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Hart dan Vitell dalam Palah (2007), bahwa lingkungan budaya dan pengalaman pribadi akan memengaruhi orientasi etika. Sementara itu, jawaban dari responden menunjukkan terdapat kompromi terhadap nilai budaya organisasi dalam perusahaan. Namun beberapa diantaranya kurang mendukung bahwa budaya organisasi harus dipatuhi. Halinya mereka menganggap bahwa daftar huruf tidak terlalu penting. Begitu pula dengan seragam kerja. Sebanyak 26% dari responden kurang setuju dengan adanya budaya seragam kerja. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chummay dan Lodge (1993).

Dalam penelitian ini, tingkat pemahaman responden atas etika perpajakan cenderung tinggi. Hal ini disebabkan oleh skala perusahaan yang cenderung kecil, jumlah karyawan tidak terlalu banyak, serta jarang memiliki standar kerja dan etika yang baku. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Longenecker (1989) yang melihat adanya perbedaan perilaku etika di antara bisnis besar dan bisnis kecil. Perusahaan kecil cenderung lebih ketat menyangkut etika.

**Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pemahaman Etika Perpajakan.** Berdasarkan hasil analisis EEM, Good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap pemahaman etika perpajakan wajib pajak di Jawa Timur dengan  $F$ -value 0,037 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan semakin baik penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan akan meningkatkan pemahaman etika perpajakan. Hasil penelitian ini didukung dengan jawaban responden yang menunjukkan perusahaan di Jawa Timur telah menerapkan Good corporate governance dengan cukup baik. Artinya, dilihat dari prinsip transparansi menunjukkan perusahaan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Selain itu, perusahaan telah melakukan kewajiban untuk memenuhi komitmen kemahasiswaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Ditambah itu, dilihat dari penerapan akuntabilitas, perusahaan telah menetapkan risiko tugas tanggung jawab yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Dalam

melaksanakannya, seluruh elemen perusahaan harus berpegang pada etika bisnis dan menjauhi perilaku yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilihat dari prinsip responsibilitas, perusahaan berpegang pada prinsip kejujuran dan jujur terhadap pemenuhan perundang-undangan, anggaran dasar, peraturan perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial yang meliputi kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan lingkungan. Perusahaan juga telah menerapkan prinsip-prinsip independensi dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penghindaran dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip kejujuran telah diterapkan dengan cukup baik. Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemangku saham dalam jangka panjang dengan cara memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain (pemangku saham, kreditor, pemasok, pelanggan, anggota perusahaan, pemerintah dan masyarakat yang berinteraksi dengan perusahaan). Penerapan Good corporate governance yang baik ini tentunya akan memengaruhi pemahaman etika perpajakan wajib pajak.

Berikutnya, penelitian ini juga menguji peran pemahaman etika perpajakan yang memediasi variabel komitmen organisasi, budaya organisasi dan Good Corporate Governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman etika pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib perpajakan. Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur etika perpajakan meliputi melaporkan jumlah yang sesuai dengan yang dibayarkan, ketepatan waktu pelaporan, melengkapi bukti laporan keuangan, sesuai terhadap pelanggaran, karena dalam menghitung pajak sendiri. Sistem self assessment yang diterapkan dalam perhitungan pajak mandiri maupun badan memengaruhi terjadinya pelanggaran pajak. Wajib pajak akan melaporkan pendapatan kena pajak cenderung lebih rendah atau bahkan tidak melaporkannya.

Beberapa riset telah dilakukan dalam upaya menguji peran etika dalam kepatuhan pajak yang berfokus pada aspek komitmen

sosial (Schwartz dan Orleans 1967, Jackson dan Brown 1984). Orientasi etika mengacu pada pengertian etika secara umum atau lebih dikekalkan dengan teori-teori psikologi tentang konsistensi antara tindakan dan kepercayaan yang dimiliki. Sementara pengertian evaluasi etika lebih berfokus pada pengertian etika secara kontekstual, yaitu menghubungkan sikap individu dan kepercayaan yang bias saja terhadap pengastang dari situasi yang dihadapi. Hasil dari mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara etika dan kepatuhan pajak. Hasil ini bertentangan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Henderson dan Kaplan (2005).

Seperi yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa objek penelitian ini adalah perusahaan kecil dengan jenis usaha dagang dan jasa dengan bentuk perungan. Rine dalam (Rachman 2003) telah melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan perusahaan terhadap etika terhadap perusahaan-perusahaan kecil terhadap peraturan perpajakan. Rine menemukan bahwa 2/3 dari perusahaan kecil yang diteliti tidak mematuhi peraturan perpajakan. Faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan kecil terhadap peraturan perpajakan adalah pengungkapan laporan keuangan kepada publik (berhubungan positif), marginal tax rate (berhubungan negatif), ukuran perusahaan (berhubungan positif), dan lokasi yang diidentifikasi oleh IRS yang masuk dalam *High Compliance* Angkor. Data yang diperoleh dari responden menunjukkan pemahaman terhadap etika yang cukup bagus. Namun demikian, perusahaan yang diteliti bukan merupakan variabel penghubung bagi variabel independen yang ada dalam penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman etika perpajakan tidak terbukti memoderasi variabel komitmen organisasi, budaya organisasi dan Good Corporate Governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel yang digunakan, hanya komitmen organisasi yang terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap etika wajib pajak. Sementara budaya organisasi dan implementasi good corporate governance terbukti berpengaruh terhadap etika wajib pajak.

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum tercapainya tujuan

penelitian untuk mengetahui dampak perubahan organisasi untuk membangun penerapan prinsip etika dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan melakukan wajib pajak badan yang bernilai besar. Penelitian ini masih sangat membutuhkan untuk dikembangkan, terutama pada pembahasan tentang tax compliance meliputi tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak) yang dibandingkan dengan berbagai kasus pelanggaran etika di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, J. dan B. Torgler. 2011. "Do Ethics Matter? Tax Compliance dan Morality." *Journal of Business Ethics* Vol. 101, No. 4, hlm. 633-651.
- Ali, J. dan B. Torgler. 2012. "Do Ethics Matter? Tax Compliance dan Morality." *Turkish Economic Working Paper Series*.
- Aprianto, A., A. Wijaya, dan K. Budh. 2014. *Sabanto Toronto Tersangka Penggelapan Pajak*. Kompas Tempo (diunduh 5 Februari 2014). <<http://www.santopri.com/id/content/sabanto-toronto-tersangka-penggelapan-pajak>>
- Ardo, A., J.A. Mitchell, dan D. Jondle. 2009. "Characteristics of Ethical Business Cultures." *Journal of business ethics* Vol. 85, No. 4, hlm. 445-451.
- Ariefians, D., S. Utama, R. Wardana, dan R. Rahayu. 2015. "Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia." *Simpodium Nasional Akuntansi 18 Medan*.
- Awang, N. dan A. Azman. 2014. "Etika dan Tax Compliance." In *Etika, Governance dan Corporate Crime: Challenges dan Consequences*, hlm. 105-113. Emerald Group Publishing Limited.
- Barri, Y. M. 2014. "Etika Modernitas Keligaitan Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money Ethic) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion)." *Simpodium Nasional Akuntansi 17 Makassar*.
- Bobek, D.D., A.M. Jensen, dan C.P. Kelther. 2011. "The Social Norms of Tax Compliance: Scale Development, Social Desirability, dan Presentation Effects." In *Advances in Accounting Behavioral Research*, hlm. 37-66. Emerald Group Publishing Limited.
- Calla, J., P. Jones, dan A. Lewis. 2007. *Tax Compliance: Social Norms, Culture dan Endogeneity*. International Studies Pro-

- gram Working Paper 07-22, Andrew Young School of Policy Studies, Atlanta.
- Cullen, J., P. Jones, dan A. Savaris. 2012. "Social Norms dan Tax Compliance: Framing the Decision to Pay Tax." *The Journal of Socio-Economics*, Vol. 41, No. 2, hlm. 159-168.
- Feld, L.P., dan B.E. Frey. 2007. "Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives dan Responsive Regulation." *Law & Policy*, Vol. 29, No. 3, hlm. 102-120.
10. Ferdiansari, A. 2000. "Struktural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen." *Badan Penelitian Universitas Diponegoro Semarang*.
- Idiana. 2014. "Etika Dan Integritas: Dualisme Kesadaran Dan Kepatuhan." *Simpulan Peningkat Akuntabilitas 17 Manado*.
- Gangl, K., E. Hoffmann, dan E. Kirchler. 2013. "Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power dan Trust." *New ideas in psychology* No. 37 hlm. 13-23.
13. Kahn, J.B., W.C. Black, B.J. Baker, B.E. Anderson, dan R.L. Tachman. 2006. *Multivariate Data Analysis*, Vol. II. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
12. Henderson, B.C. dan S.E. Kaplan. 2005. "Examination of the Role of Ethics in Tax Compliance Decisions." *The Journal of the American Taxation Association*. Spring, Vol 27, No. 1, hlm. 39-72.
15. Hoffmann, K., E. Hoffel, dan E. Kirchler. 2008. "The conditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge dan Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, dan Motivation to Cooperate." *Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology*, Vol. 216, No. 4, hlm. 209-217.
- Jackson, B.B., dan C.V. Millnes. 1986. "Tax Compliance Research: Findings, Problems dan Prospects." *Journal of Accounting Literature*, No. 5, hlm. 125-165.
- Kanjoto, B.Sabroto, Sutrisno, dan Rosidi. 2012. "Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan." *Jurnal Akuntansi Mahasiswa* 22, Vol. 2 No. 1, hlm. 60-74.
- Levina, A., S. Carrera, J. Cullen, dan P. Jones. 2009. "Individual, Cognitive dan Cultural Differences in Tax Compliance: UK dan Italy Compared." *Journal of Economic Psychology*, No. 30, hlm. 421-445.
16. Meyer, J.P., M.J. Allen, dan C.A. Smith. 1993. "Commitment to Organizations dan Occupations: Extension dan Test of a Three-Component Conceptualization." *Journal of applied psychology* Vol. 78, No. 4, hlm. 528.
21. Mustikasari, E. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*, Simposium Nasional Akuntansi 8, Makasar.
18. Nikmatulrahmah. 2015. "Kinerja Dan Etika Pelayanan Sektor Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 3.
- Praswedirdjo, A.S. 2007. *Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Dirboke Administrasi Modern Di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Akasaja/Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang*.
- Rahayu, D.P. 2013. "Pegawai Wajib Pajak Tidak Patuh Melaporkan Pajak." *Simpulan Nasional Akuntansi 15 Medan*.
- Rahayu, 14 dan L.R. Lingga. 2011. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Area Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung 87)." *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 2, hlm. 119-126.
- Rose, M. 2003. "On Rising Levels of Qualification After Work Ethics, Work Orientation dan Organizational Commitment for the Winner? Evidence from the UK, 1985-2001." *Journal of Education dan Work*, Vol 18, No. 2, hlm. 131-164.
22. Ryan, R.M., Venetika Rata, dan Edward L. Deci. 2008. "Living Well: A Self-Determination Theory Perspective on Eudaimonia." *Journal of Happiness Studies*, Vol 9 No 1, hlm. 139-170.
- Schwartz, E. D., dan S. Gilman. 1967. "On Legal Sanctions." *University of Chicago Law Review* 34 No. 34 hlm. 274-300.
- Yuliantiana, I. 2005. "Kajian Etika Budgetary Slack Di Organisasi Sektor Publik Melalui Perspektif Gender." *Simpulan Riset Ekonomi 8*

# 05. ETIKA, ORGANISASI, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet	162 words — 3%
2	<a href="https://www.repository.uinjkt.ac.id">www.repository.uinjkt.ac.id</a> Internet	73 words — 1%
3	<a href="https://paul02583.files.wordpress.com">paul02583.files.wordpress.com</a> Internet	58 words — 1%
4	<a href="https://ejournal.narotama.ac.id">ejournal.narotama.ac.id</a> Internet	46 words — 1%
5	<a href="https://tthebeginning.blogspot.com">tthebeginning.blogspot.com</a> Internet	38 words — 1%
6	<a href="https://maxerta.blogspot.com">maxerta.blogspot.com</a> Internet	36 words — 1%
7	<a href="https://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet	31 words — 1%
8	<a href="https://apparindo.or.id">apparindo.or.id</a> Internet	29 words — < 1%
9	<a href="https://uvadoc.uva.es">uvadoc.uva.es</a> Internet	28 words — < 1%
10	Amitai Etzioni. "Happiness is the Wrong Metric", Springer Nature, 2018 Crossref	25 words — < 1%
11	<a href="https://syifaa-syifaa.blogspot.com">syifaa-syifaa.blogspot.com</a>	

25 words — &lt; 1 %

12 [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Internet

24 words — &lt; 1 %

13 [www.indopajak.com](http://www.indopajak.com)

Internet

24 words — &lt; 1 %

14 [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet

23 words — &lt; 1 %

15 [onlinelibrary.wiley.com](http://onlinelibrary.wiley.com)

Internet

23 words — &lt; 1 %

16 [www.jejakakuntansi.net](http://www.jejakakuntansi.net)

Internet

23 words — &lt; 1 %

17 Hartl, Barbara, Eva Hofmann, and Erich Kirchler. "Do we need rules for "what's mine is yours"? Governance in collaborative consumption communities", *Journal of Business Research*, 2016.

Crossref

22 words — &lt; 1 %

18 [www.umnaw.ac.id](http://www.umnaw.ac.id)

Internet

22 words — &lt; 1 %

19 [commons.ln.edu.hk](http://commons.ln.edu.hk)

Internet

21 words — &lt; 1 %

20 [sofyanpu.blogspot.com](http://sofyanpu.blogspot.com)

Internet

21 words — &lt; 1 %

21 [journal.perbanas.ac.id](http://journal.perbanas.ac.id)

Internet

20 words — &lt; 1 %

22 Alexis Downs, Beth Stetson. "Economic and Non-Economic Factors: An Analysis of Corporate Tax Compliance", *Emerald*, 2014

Crossref

20 words — &lt; 1 %

23	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	20 words — < 1%
24	<a href="http://repository.upy.ac.id">repository.upy.ac.id</a> Internet	19 words — < 1%
25	Leder, S.. "Regulatory fit effects on perceived fiscal exchange and tax compliance", Journal of Socio-Economics, 201004 Crossref	18 words — < 1%
26	<a href="http://learnourworld.wordpress.com">learnourworld.wordpress.com</a> Internet	18 words — < 1%
27	Donna D. Bobek, Amy M. Hageman, Charles F. Kelliher. "The Social Norms of Tax Compliance: Scale Development, Social Desirability, and Presentation Effects", Emerald, 2011 Crossref	17 words — < 1%
28	<a href="http://documents.mx">documents.mx</a> Internet	17 words — < 1%
29	Rose Marie Codling. "Creating an Optimal Learning Environment for Struggling Readers", Emerald, 2013 Crossref	16 words — < 1%
30	Limberg G., Iwan R., Moeliono M., Indriatmoko Y., Mulyana A., Utomo N.A.. "Bukan hanya laba: prinsip-prinsip bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2009 Crossref	16 words — < 1%
31	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
32	<a href="http://eprints.upnjatim.ac.id">eprints.upnjatim.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
33	<a href="http://pasca.unhas.ac.id">pasca.unhas.ac.id</a>	

Internet

13 words — < 1%

34 [slideplayer.info](#)

Internet

13 words — < 1%

35 [digilib.esaunggul.ac.id](#)

Internet

13 words — < 1%

36 [doaj.org](#)

Internet

12 words — < 1%

37 [docslide.us](#)

Internet

12 words — < 1%

38 Claretha Hughes. "Chapter 3 Values and Decision-Making", Springer Nature America, Inc, 2019

Crossref

11 words — < 1%

39 [illaper.blogspot.com](#)

Internet

11 words — < 1%

40 [ebookmarket.org](#)

Internet

11 words — < 1%

41 [mpira.ub.uni-muenchen.de](#)

Internet

11 words — < 1%

42 Lita Dwi Damayanti, Nik Amah. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2018

Crossref

10 words — < 1%

43 [perpusnwu.web.id](#)

Internet

10 words — < 1%

44 [ojs.unud.ac.id](#)

Internet

9 words — < 1%



45	<a href="http://ejournal.bsi.ac.id">ejournal.bsi.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
46	<a href="http://lilinpendidikan.blogspot.com">lilinpendidikan.blogspot.com</a> Internet	9 words — < 1%
47	<a href="http://repositorio.unifei.edu.br">repositorio.unifei.edu.br</a> Internet	9 words — < 1%
48	<a href="http://eprints.observeit.com">eprints.observeit.com</a> Internet	8 words — < 1%
49	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
50	<a href="http://kdl.co.id">kdl.co.id</a> Internet	8 words — < 1%
51	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
52	<a href="http://ejournal.unesa.ac.id">ejournal.unesa.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
53	<a href="http://jsma.stan-im.ac.id">jsma.stan-im.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
54	<a href="http://fe.ustjogja.ac.id">fe.ustjogja.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
55	<a href="http://elib.unikom.ac.id">elib.unikom.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
56	Charles F. Kelliher. "A Tax Planning Case Using a Taxpayer Life-Cycle Approach", Emerald, 2014 Crossref	7 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES      OFF  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES      OFF